Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

ANALISIS PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA (IKN): ANTARA KEPENTINGAN ELITE DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dike Ramadan, Hendi Irawan S.Pd., M.Kesos
Universitas Indraprastha PGRI

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

dikeramadan22@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menandai pergeseran paradigma peran negara dari neoliberalisme menuju neodevelopmentalism yang dominan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika relasi kuasa, implikasi sosial-ekonomi, dan aspek politik-hukum dalam proyek IKN. Melalui tinjauan literatur dan analisis teoretis, ditemukan bahwa dominasi negara yang kuat memicu proses legislasi yang terburu-buru dan meminimalkan partisipasi publik. Meskipun pemerintah menjanjikan pemerataan melalui narasi "Indonesia-sentris", realitas di lapangan menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) serta marginalisasi masyarakat lokal dan adat. Kebijakan agraria yang memberikan konsesi lahan hingga 190 tahun menjadi bukti nyata keberpihakan negara terhadap kepentingan elite dan investor di atas hak-hak tradisional. Selain itu, visi Green City menghadapi risiko greenwashing akibat ketergantungan wilayah pada industri ekstraktif. Studi ini menyimpulkan bahwa pembangunan IKN saat ini lebih mencerminkan kepentingan elite ekonomi-politik. Dibutuhkan redistribusi kekuasaan dan evaluasi kebijakan agraria yang mendalam agar pembangunan IKN dapat mencapai keadilan sosial dan ekologis yang substantif.

Kata Kunci: IKN, Neodevelopmentalism, Relasi Kuasa, Ketimpangan Sosial, Masyarakat Adat.

ABSTRACT

The development of the New Capital City (IKN) marks a paradigm shift in the state's role, transitioning from neoliberalism toward dominant neodevelopmentalism. This article aims to analyze the dynamics of power relations, socio-economic implications, and political-legal aspects of the IKN project. Through literature review and theoretical analysis, it is found that strong state dominance has triggered a rushed legislative process and minimized public

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

participation. Although the government promises equitable development through an "Indonesia-centric" narrative, the reality on the ground indicates an increase in economic inequality (Gini Ratio) and the marginalization of local and indigenous communities. Agrarian policies offering land concessions for up to 190 years serve as clear evidence of the state's bias toward elite and investor interests over traditional rights. Furthermore, the "Green City" vision faces the risk of greenwashing due to the region's dependence on extractive industries. This study concludes that the current development of IKN primarily reflects the interests of the economic-political elite. A redistribution of power and a profound evaluation of agrarian policies are required for IKN development to achieve substantive social and ecological justice.

***Keywords**: IKN, Neodevelopmentalism, Power Relations, Social Inequality, Indigenous Peoples.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara memegang peran sentral dalam mengarahkan kebijakan pembangunan demi mencapai kesejahteraan nasional. Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan salah satu kebijakan publik terbesar dalam sejarah Indonesia yang mengusung visi transformasi ekonomi melalui paradigma "Indonesia-sentris". Melalui pemindahan pusat pemerintahan, negara berupaya menciptakan diversifikasi ekonomi serta memicu *multiplier effect* guna mengurangi ketimpangan antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya (Ernawati et al., 2022). Namun, sebagai proyek publik yang masif, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari keterbatasan ruang fiskal hingga risiko hambatan implementasi jika tidak disertai dengan tata kelola yang inklusif terhadap seluruh pihak terkait.

Di balik narasi kemajuan tersebut, terdapat realitas sosial-ekologis yang mengkhawatirkan bagi masyarakat lokal. Pembangunan fisik yang masif di IKN berpotensi memicu deforestasi, pencemaran, dan fragmentasi habitat yang mengancam keseimbangan ekosistem di Kalimantan Timur. Lebih jauh lagi, terdapat ketimpangan relasi kuasa antara negara dan masyarakat adat. Lemahnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan menyebabkan ancaman nyata terhadap kehilangan tanah ulayat dan marginalisasi identitas budaya (Luthfiya et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak akan berjalan ideal selama kepentingan negara berjalan terpisah dari perlindungan hak-hak komunitas lokal yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Kontradiksi antara kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan akumulasi modal semakin terlihat dalam kebijakan pertanahan di IKN. Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) hingga jangka waktu 190 tahun bagi investor, seperti yang tercantum dalam PP No. 12 Tahun 2023, dinilai menyimpang dari prinsip fungsi sosial tanah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kebijakan ini justru membuka peluang terjadinya monopoli lahan oleh korporasi besar dan memperbesar ketidakpastian hukum bagi masyarakat lokal (Gibran et al., 2025). Secara ekonomi politik, pemberian konsesi jangka panjang tersebut mencerminkan kecenderungan negara yang lebih mengutamakan insentif bagi elite ekonomi atau investor ketimbang pemerataan akses agraria bagi rakyat. Atas dasar tersebut, analisis mengenai peran negara dalam pembangunan IKN menjadi krusial untuk memetakan bagaimana relasi kuasa bekerja di balik kebijakan pembangunan Indonesia kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relasi kekuasaan antara negara, kelompok elite, dan masyarakat lokal terwujud dalam proses formulasi serta implementasi kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)?
2. Sejauh mana instrumen regulasi dalam pembangunan IKN (seperti kebijakan hak guna usaha dan pengelolaan lahan) mencerminkan prioritas terhadap akumulasi kepentingan elite dibandingkan pemenuhan hak kesejahteraan masyarakat?
3. Siapa aktor yang paling diuntungkan secara signifikan dari proyek strategis nasional IKN, dan bagaimana dampaknya terhadap marginalisasi sosial-ekologis masyarakat adat di wilayah tersebut?

C. Tujuan penulisan

1. Menganalisis dinamika relasi kuasa dan motif politik-ekonomi yang mendasari peran negara dalam menggerakkan proyek pembangunan IKN.
2. Mengevaluasi keberpihakan regulasi pembangunan IKN dalam menyeimbangkan antara target investasi nasional dengan perlindungan hak-hak agraria dan kesejahteraan masyarakat lokal.
3. Mengidentifikasi distribusi manfaat dari kebijakan IKN guna memetakan potensi ketimpangan antara keuntungan kelompok elite (investor/korporasi) dengan beban sosial-ekologis yang ditanggung oleh masyarakat setempat.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

TINJAUAN PUSTAKA/KERANGKA TEORETIS

A. Landasan Teoretis

Teori modernisasi menempatkan pembangunan sebagai langkah sistematis untuk mentransformasi tatanan kehidupan bangsa menuju kemajuan material maupun spiritual. Di Indonesia, paradigma ini sangat dominan, di mana aparatur pemerintah berperan krusial sebagai pengelola sumber daya demi mencapai efisiensi dan kesejahteraan nasional (F. Setiawan, 2019). Dalam kerangka ini, proyek IKN diposisikan sebagai simbol modernitas sekaligus katalisator transformasi Indonesia menuju status negara maju.

Namun, pembangunan infrastruktur skala besar tidak pernah lepas dari persinggungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi. Keputusan kebijakan sering kali dipengaruhi oleh dinamika antara elite, sektor swasta, dan BUMN, alih-alih sekadar menjawab kebutuhan strategis publik. Realitas ini memunculkan risiko ketergantungan pada modal eksternal serta potensi ketimpangan distribusi manfaat, terutama bagi masyarakat di tingkat lokal (Aulea et al., 2025). Di era kontemporer, relasi ini semakin kompleks dengan adanya media sosial yang menuntut transparansi lebih besar. Negara kini harus lebih responsif dalam mengelola legitimasi publik di tengah pertarungan kepentingan yang semakin kompetitif (Noorikhsan et al., 2023).

B. Konsep Kunci

Dalam penelitian ini, konsep negara dipahami dari perspektif administrasi pembangunan sebagai penggerak utama yang mengonsolidasikan birokrasi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai target nasional (F. Setiawan, 2019). Peran tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, yang tidak hanya dipandang sebagai konstruksi fisik, melainkan instrumen politik untuk memperkuat legitimasi dan mendistribusikan pengaruh di antara aktor-aktor kekuasaan (Aulea et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan menjadi arena interaksi yang dinamis antara negara dan masyarakat. Arena ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan media baru, yang memaksa negara untuk tetap berpegang pada prinsip keadilan di bawah pengawasan publik yang masif (Noorikhsan et al., 2023).

C. Sintesis Teori (Kritik dan Perbandingan)

Tinjauan terhadap berbagai literatur di atas mengungkap adanya kontradiksi dalam praktik pembangunan di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah menggunakan narasi Teori Modernisasi sebagai basis moral untuk menjustifikasi megaproyek seperti IKN demi mengejar kemajuan bangsa (F. Setiawan, 2019). Namun, melalui perspektif Ekonomi Politik, terlihat

bahwa pembangunan tersebut rentan menjadi alat bagi kepentingan elite dan korporasi, yang berisiko memicu konflik agraria serta marginalisasi komunitas lokal (Aulea et al., 2025).

Perbandingan ini mengindikasikan adanya celah (gap) antara janji kesejahteraan dalam narasi resmi dengan kenyataan distribusi manfaat di lapangan. Untuk menjembatani celah tersebut, negara kini berhadapan dengan kekuatan media baru yang memberikan ruang bagi publik untuk menekan otoritas agar tetap konsisten pada asas keadilan (Noorikhsan et al., 2023). Dengan demikian, kerangka teori ini menyimpulkan bahwa pembangunan IKN merupakan hasil tarik-menarik antara ambisi modernisasi negara, kepentingan ekonomi kelompok elite, dan tuntutan keadilan dari masyarakat.

METODOLOGI PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengombinasikan studi literatur *(library research)* dan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih guna membedah secara mendalam fenomena peran negara dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Melalui studi literatur, penulis menelaah berbagai referensi ilmiah yang kemudian dikontekstualisasikan dengan fakta-fakta pada kasus pembangunan IKN sebagai objek observasi utama.

B. Pendekatan Penelitian

Analisis dalam penulisan ini dilakukan melalui pendekatan sosiologis. Fokus utama pendekatan ini adalah memetakan struktur sosial, relasi kuasa antar-aktor (negara, kelompok elite, dan masyarakat), serta dampak sosial yang muncul dari kebijakan pembangunan terhadap komunitas lokal maupun masyarakat adat. Dengan perspektif ini, pembangunan IKN tidak sekadar dipandang sebagai proyek fisik infrastruktur, melainkan sebagai manifestasi dari kontestasi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.

C. Sumber Data

Seluruh data dalam penulisan ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Referensi utama diperoleh dari artikel jurnal ilmiah yang mengkaji kebijakan IKN dalam lingkup administrasi pembangunan, ekonomi politik, dan sosiologi. Selain itu, penulis juga menyertakan dokumen resmi berupa regulasi terkait, seperti Undang-Undang IKN beserta aturan turunannya, serta laporan atau berita ilmiah yang relevan guna memperkuat basis analisis terhadap kebijakan tersebut.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

D. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif teoretis. Penulis menjabarkan fakta-fakta terkait kebijakan pembangunan IKN untuk kemudian dikritisi menggunakan teori-teori pembangunan yang relevan. Proses ini ditujukan untuk melihat sejauh mana kesenjangan yang terjadi antara narasi kebijakan pemerintah *(das sollen)* dengan kenyataan sosiologis di lapangan *(das sein)*.

PEMBAHASAN

Peran negara dalam pembangunan IKN menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. Jika pada era Orde Baru kebijakan investasi cenderung bersifat neoliberal (mengikuti pasar), pada era pemerintahan saat ini terdapat transisi menuju strategi *neodevelopmentalism* (Pembangunan Baru) (Iksan, 2022). Dalam strategi ini, negara tidak lagi hanya menjadi pengawas, tetapi bertindak aktif dalam intervensi ekonomi, melalui penguatan regulasi dan penggunaan BUMN untuk mempercepat proyek strategis. Namun, dominasi negara ini membawa risiko politik-hukum; proses pembentukan UU IKN yang hanya memakan waktu 43 hari menunjukkan adanya "politik hukum" yang terburu-buru dan meminimalkan partisipasi publik demi mengejar target pembangunan (Benia & Nabilah, 2022). Dominasi negara yang terlalu kuat (state-led) tanpa pengawasan publik yang memadai pada akhirnya berisiko melahirkan kebijakan yang bersifat elitis dan mengabaikan legitimasi demokratis.

Secara teoretis, pemerintah menggunakan Teori Modernisasi untuk menjanjikan pemerataan melalui "Indonesia-sentris" (Ernawati et al., 2022; F. Setiawan, 2019). Namun, melalui perspektif Teori Risiko (Ulrich Beck), terlihat bahwa pembangunan IKN sebenarnya membawa konsekuensi kapitalisme global yang besar, di mana sistem neoliberalisme dalam pemberian fasilitas investor menciptakan ketidakpastian bagi stabilitas ekonomi lokal (Setiawan et al., 2024).

Dampaknya terlihat pada distribusi manfaat yang tidak merata. Data menunjukkan peningkatan *Gini Ratio* di wilayah sekitar IKN, di mana kelompok masyarakat menengah-atas dan investor mendapatkan keuntungan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan masyarakat lokal yang berpenghasilan rendah (Mufidah et al., 2025). Di sini terjadi benturan perspektif: Teori Modernisasi menganggap pertumbuhan ekonomi makro sebagai sukses, namun Teori Ekonomi Politik mengkritik bahwa pertumbuhan tersebut bersifat semu jika distribusi pendapatannya justru memperlebar jurang ketimpangan sosial di Kalimantan Timur.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat dalam pembangunan IKN sangat timpang, terutama dalam aspek agraria. Negara menggunakan otoritasnya untuk menetapkan kawasan IKN di atas lahan yang sering kali bersinggungan dengan hak ulayat. Konflik agraria ini dipicu oleh kebijakan yang cenderung lebih memihak pada kepentingan eksploitasi sumber daya dan perizinan korporasi daripada perlindungan hak-hak tradisional masyarakat adat (Prasetya et al., 2024).

Pemberian konsesi lahan yang luar biasa panjang (HGU 190 tahun) menjadi bukti nyata bagaimana relasi kuasa bekerja untuk memfasilitasi kepentingan elite/kapitalis di atas prinsip fungsi sosial tanah (Gibran et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN mencerminkan praktik "hukum yang melayani kekuasaan", di mana regulasi agraria direkayasa sedemikian rupa untuk menjamin keamanan aset investor, namun di sisi lain mengabaikan hak hidup dan identitas budaya masyarakat lokal yang telah menetap selama puluhan tahun (Luthfiya et al., 2025).

Negara mempromosikan IKN dengan visi Green City sebagai bentuk pembangunan alternatif yang berkelanjutan (Amirullah & Maksudi, 2024). Namun, terdapat tantangan besar berupa ketergantungan ekonomi wilayah Kalimantan Timur terhadap industri ekstraktif (tambang dan migas). Terdapat indikasi potensi *greenwashing*, di mana narasi kota hijau digunakan sebagai citra politik di media baru untuk mendapatkan legitimasi public (Noorikhsan et al., 2023), sementara di lapangan, deforestasi dan kerusakan ekosistem terus berlanjut akibat pembangunan fisik yang masif. Tanpa adanya kebijakan afirmatif yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat adat, visi kota hijau ini hanya akan menjadi simbol kemajuan tanpa substansi keadilan ekologis.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur tersebut, terlihat perbedaan tajam antara janji negara dengan realitas sosiologis di lapangan. Di satu sisi, Teori Modernisasi memandang pembangunan sebagai proses linier menuju kemajuan yang membutuhkan stabilitas birokrasi serta penguatan infrastruktur fisik. Namun, perspektif Ekonomi Politik dan *neodevelopmentalism* memberikan kritik keras bahwa pembangunan yang berjalan tanpa partisipasi bermakna merupakan alat akumulasi kapital bagi kelompok elite. Negara yang terlalu dominan sering kali terjebak pada kepentingan jangka pendek investor dan mengabaikan ketimpangan distributif yang tercermin dalam peningkatan *Gini Ratio*.

Pada akhirnya, peran negara dalam pembangunan IKN saat ini lebih mencerminkan kepentingan elite ekonomi-politik yang dibungkus dengan narasi modernitas. Pihak yang paling diuntungkan dalam struktur ini adalah kelompok korporasi dan birokrat, sedangkan masyarakat

adat serta ekosistem lokal berada pada posisi yang termarginalkan. Pembangunan yang benar-benar inklusif hanya dapat tercapai jika negara melakukan redistribusi kekuasaan kepada masyarakat lokal dan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan agraria yang saat ini terlalu berorientasi pada kepentingan pasar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan manifestasi nyata dari peran negara yang sangat dominan *(state-led development)* dengan corak *neodevelopmentalism*. Namun, dominasi ini menciptakan relasi kekuasaan yang timpang, di mana perumusan kebijakan yang terburu-buru cenderung mengabaikan kedaulatan aspirasi publik demi mengejar target teknokratis dan legitimasi politik semata. Keberpihakan regulasi, terutama melalui instrumen agraria seperti pemberian HGU hingga 190 tahun, memperlihatkan bahwa negara lebih memprioritaskan penyediaan "karpet merah" bagi akumulasi modal kelompok elite dan investor dibandingkan perlindungan hak-hak masyarakat. Kondisi ini menyebabkan distribusi manfaat yang tidak merata; keuntungan ekonomi secara signifikan dinikmati oleh kelompok korporasi dan birokrat, sementara masyarakat lokal serta masyarakat adat justru menghadapi risiko marginalisasi ruang hidup, ancaman bencana ekologis, dan pelebaran jurang ketimpangan sosial.

B. Saran

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan agraria di IKN, khususnya mengenai jangka waktu pemberian hak atas tanah yang berlebihan, guna mengembalikan prinsip fungsi sosial tanah. Pendekatan pembangunan harus segera digeser dari model *top-down* menjadi partisipatif-inklusif dengan memberikan pengakuan hukum yang nyata terhadap hak ulayat masyarakat adat. Keberhasilan IKN tidak boleh hanya diukur melalui kemegahan infrastruktur fisik, melainkan dari sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan sebagai subjek ekonomi dan terjaganya keberlanjutan ekosistem Kalimantan. Terakhir, penguatan pengawasan oleh masyarakat sipil menjadi krusial untuk memastikan transparansi dan mencegah praktik state capture oleh kelompok elite, sehingga pembangunan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan publik yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, M. Y., & Maksudi, E. I. (2024). Implementing Green Economy Concepts to Realise IKN's Vision as a Green City. *Jurnal Lemhannas RI*, *12*(3), 349–360. https://doi.org/10.55960/jlri.v12i3.982

Aulea, B., Zahwa, A., & Sari, P. I. (2025). Analisis Politik Ekonomi dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(11), 3031–5220. https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3369

Benia, E., & Nabilah, G. (2022). Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(10), 806–825. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323

Ernawati, A., Wahyudi, J., Astuti, A. D., & Aini, S. Q. (2022). Analisis Kelayakan Pendirian Usaha Pengolahan Limbah Medis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *13*(1), 57–70. https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2155

F. Setiawan. (2019). Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke -3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, *8*(2), 59–60. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/download/1033/1814

Gibran, M. F., Sumarja, F., & Adhan, S. (2025). Pemberian Hak Guna Usaha (Hgu) Di Ibu Kota Nusantara (Ikn) Dalam Perspektif Undang Undang Pokok Agraria (Uupa) Dan Pembangunan Ekonomi Nasional. *Sibatik Journal | Volume*, *4*(6), 833–844. https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/2819

Iksan, M. (2022). From Neoliberalism to Neodevelopmentalism: Indonesian's Investment Policy on the Foreign Capital Post-new Order. *Jassp*, *2*(1), 45–56. https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.35

Luthfiya, N., Nabila, N. S., D, F. A. P., & Naryama, A. D. (2025). IKN Nusantara : Bencana Ekologis yang Mengancam Warisan Adat. *Jurnal Prasadja Sosial Humaniora*, *1*(1), 78–93. https://jurnalpatriotbangsa.com/jpsh/article/view/18

Mufidah, H. I., Dhanyswara, A. N., & Putri, A. S. (2025). Distribusi Manfaat Pembangunan dalam Proyek Ibu Kota Nusantara (Ikn) dan Ketimpangan Sosial: Studi Kasus Di Kalimantan Timur. *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *1*(1), 83–87. https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/albahts/article/view/5045

Noorikhsan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal*

of Political Issues, *5*(1), 95–109. https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131

Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(2), 686. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/642

Setiawan, D. B., Daryono, D., Amelia, E. R., & Eduwin, E. (2024). Kapitalisme Sebagai Sebuah Risiko Dalam Pembangunan IKN. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, *4*(2), 64–73. https://doi.org/10.51903/dinamika.v4i2.516